

# ANALISA MELEK POLITIK WARGA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

Studi Kasus: Desa Jerukwudel dan Desa Karangawen Kecamatan Girisubo Kabupaten

Gunungkidul DIY

**Rosalia Widhiastuti Sri Lestari**

Universitas Gunung Kidul Yogyakarta

Email: [rosalia\\_widhiastuti@yahoo.co.id](mailto:rosalia_widhiastuti@yahoo.co.id)

## **Abstract**

*Election , collectively is an instrument embody sovereignty of people intend to create government and articulate absah of their opinions and also the interests of the people , the election is requisite at least for the democracy and held by choosing the house of representatives .Based on data the ballot of its election in 2014 in kabupaten gunungkidul so prosentase participation or presence of voters legislative elections by 2014 470.455 or 78.53 % of 591.600 DPT (election in the 2014) year. For the gunungkidul in the legislative elections and presidential election 2014 period , public participation is quite high between 73 % to 84 % in each subdistrict .Participation in the presence of voters in legislative elections the highest of 83 % the sub wonosari and presence of voters in legislative elections the lowest of 73,04 % the sub girisubo. While the absence of the lowest in district wonosari of 16,89 % and the absence of the highest in district girisubo at 26,96 % .partisipasi political people are usually are to social basis - particular political base. The same base will get people to participate hence can dikelompokkan over, first, class, namely individu-individu involved in political participation because have social status, income and lapngan the same job, both, communal group, namely individuals engaged having tribe, religion, race and the same language.Third, neighborhood the individuals engaged because have residence adjacent to each other, fourth, faction, the individuals engaged in participation because they united by private inetraksi very high each other yang.literarasi politics was, practical understanding on the concept “ taken from the day to “ day and language.One of the politics of cultural political prominent in indonesia tendency the formation of links between patronage , both for the and the community. There are two individuals in this culture the patron and client that make interaction timbale back with exchange resources masing-masing parties. Patron with the resources of power, position, protection, attention and often of material, while clients with the resources of energy, support, and loyaltyThis tendency patronage can be determined widely both in the bureaucracy and in the masyarakat.penelitian it uses a qualitative methodology the case study commonly used for exposing and understand something behind a little was found and give details on the phenomena complex difficult expressed by quantitative methods. A population that used in this research was people were enrolled in regular voters (DPT) in the village jerukwudel and karangawen in girisubo, gunungkidul district.*

**Password: Election, Participation, Literate Political, Patronage.**

## **Abstrak**

*Pemilu, secara umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan juga kepentingan rakyat, pemilu adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan memilih wakil rakyat. Berdasar data hasil perolehan suara pemilu tahun 2014 di Kabupaten Gunungkidul maka prosentase partisipasi atau kehadiran pemilih Pemilu Legislatif 2014 sebesar 470.455 atau 78.53% dari 591.600 DPT (Pemilu dalam angka tahun 2014). Untuk masyarakat Gunungkidul dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif*

maupun Pemilihan Presiden periode 2014, tingkat partisipasi masyarakatnya cukup tinggi yaitu antara 73% sampai dengan 84% di setiap kecamatan. Partisipasi dalam kehadiran pemilih pada pemilu legislatif yang paling tinggi sebesar 83% yaitu di Kecamatan Wonosari dan kehadiran pemilih pada pemilu legislatif yang terendah sebesar 73,04% yaitu di kecamatan Girisubo. Sedangkan ketidakhadiran paling rendah di Kecamatan Wonosari sebesar 16,89% dan ketidakhadiran paling tinggi di Kecamatan Girisubo yang mencapai 26,96%. Partisipasi politik masyarakat biasanya juga bersumber pada basis- basis sosial politik tertentu. Basis yang sama akan mendorong orang untuk berpartisipasi oleh karena itu bisa dikelompokkan atas, Pertama, kelas, yaitu individu-individu yang terlibat dalam partisipasi politik karena memiliki status sosial, income dan lapangan pekerjaan yang sama, Kedua, communal group, yaitu individu yang terlibat karena memiliki suku, agama, ras dan bahasa yang sama. Ketiga, neighborhood yaitu individu – individu yang terlibat karena memiliki tempat tinggal yang berdekatan satu sama lain, Keempat, faction, yaitu individu – individu yang terlibat dalam partisipasi karena mereka disatukan oleh inetraksi pribadi yang sangat tinggi satu sama lain yang.Literarasi Politik adalah, pemahaman praktis tentang konsep – konsep yang diambil dari kehidupan sehari – hari dan bahasa. Salah satu budaya politik termasuk budaya politik yang menonjol di Indonesia yaitu kecenderungan pembentukan pola hubungan patronase, baik di kalangan penguasa maupun masyarakat. Ada dua individu dalam budaya ini yaitu patron dan klien yang membuat interaksi timbale balik dengan tukar menukar sumber daya masing-masing pihak. Patron mempunyai sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan, perlindungan, perhatian dan tidak jarang berupa materi, sedangkan klien mempunyai sumber daya berupa tenaga, dukungan, dan loyalitas. Kecenderungan patronase ini dapat ditentukan secara luas baik dalam lingkungan birokrasi maupun dalam kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang biasa digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit baru diketahui dan memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif. populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di desa Jerukwudel dan Karangawen Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.

**Kata kunci : Pemilu, Partisipasi, Melek Politik, Patronase.**

## **Pendahuluan**

Pemilihan umum (pemilu) adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pemilihan Umum tersebut menjamin tersalurnya suara rakyat. Di Indonesia sampai saat ini ada beberapa pemilihan umum, seperti Pemilihan Umum untuk legislatif tingkat Nasional (DPR), DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden, dan Pemilihan Umum tingkat Daerah untuk pemilihan Bupati/Walikota. Di tingkat desa dilakukan pesta demokrasi untuk memilih seorang Kepala Desa yang disebut dengan PILKADES (Pemilihan Kepala Desa). Pemilihan umum merupakan suatu pencerminan dari sistem demokrasi, dengan dilakukannya pemilihan umum dianggap dapat menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya. Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD tingkat Propinsi, ataupun DPRD tingkat Kabupaten Kota. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pemilihan Umum

adalah sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara Langsung Umum Bebas, Jujur, dan Adil dalam kesatuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Berdasar data hasil perolehan suara pemilu tahun 2014 di Kabupaten Gunungkidul maka prosentase partisipasi atau kehadiran pemilih Pemilu Legislatif 2014 sebesar 470.455 atau 78.53% dari 591.600 DPT (Pemilu dalam angka tahun 2014). Untuk masyarakat Gunungkidul dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden periode 2014, tingkat partisipasi masyarakatnya cukup tinggi yaitu antara 73% sampai dengan 84% di setiap kecamatan. Partisipasi dalam kehadiran pemilih pada pemilu legislatif yang paling tinggi sebesar 83% yaitu di Kecamatan Wonosari dan kehadiran pemilih pada pemilu legislatif yang terendah sebesar 73,04% yaitu di kecamatan Girisubo. Sedangkan ketidakhadiran paling rendah di Kecamatan Wonosari sebesar 16,89% dan ketidakhadiran paling tinggi di Kecamatan Girisubo yang mencapai 26,96%. Tingkat kehadiran dan ketidakhadiran dalam pemungutan suara merupakan cerminan dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pemilu. Daerah dengan tingkat partisipasi yang tinggi merupakan daerah yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan yaitu Kecamatan Wonosari. Namun Kecamatan Girisubo, menurut data KPUD Kabupaten gunungkidul diketahui tingkat partisipasi warga Kecamatan Girisubo tercatat terendah dalam pemilu legislatif dan presiden 2014 sebesar 73,04%.

Perilaku demokrasi yang tercermin dari perilaku pemilih dipengaruhi oleh nilai-nilai dan pengetahuan tentang segala hal yang terkait tentang partai politik dan calon yang diusungnya. Melek Politik atau Literasi Politik adalah bauran kompleks dari praktek – praktek sosial yang memungkinkan orang untuk menjadi warga negara yang aktif dan efektif. (Catherine Macrae dkk; 2006). Terdapat keyakinan bahwa tingkat melek politik warga berpengaruh pada sikap dan perilaku politik warga negara. Muaranya adalah pada tingkat kedewasaan perilaku berdemokrasi. Relasi itu bersifat perbandingan lurus, yaitu semakin tinggi tingkat melek politik warga semakin matang perilaku demokrasinya, dan sebaliknya. Dengan kata lain, wajah demokrasi sebuah negara sebagian ditentukan oleh tingkat melek politik warganya.

Sasaran utama penelitian ini adalah mengkaji seberapa dalam melek politik warga dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan yang masih merupakan bagian dari riset partisipasi pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah Desa Jerukwudel dan Desa Karangawen Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul. Daerah tersebut dipilih karena pertimbangan

angka partisipasi pemilihnya yang paling rendah di Kabupaten Gunungkidul pada Pemilu legislatif tahun 2014 dan berada di daerah perbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah (Kabupaten Wonogiri). Hal ini tentunya cukup menarik untuk dikaji terutama mengenai tingkat melek politik warga.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan :

1. Bagaimana perilaku demokrasi masyarakat di Kabupaten Gunungkidul khususnya di Desa Jerukwudel dan Desa Karangawen Kecamatan Girisubo pada pemilu legislatif 2014?
2. Bagaimana tingkat melek politik warga selama ini terbentuk di Desa Jerukwudel dan Desa Karangawen?

## **Pembahasan**

### **Kajian Pustaka**

Pemilu, secara umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan juga kepentingan rakyat (Trichayo,2009:6) Sedangkan menurut Soedarsono (2005, dalam Trichayo,2009) pemilu adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Pemilu merupakan pranata terpenting suatu negara demokratis terlebih bagi negara yang berbetuk Republik, seperti negara Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip demokrasi yaitu Kedaulatan rakyat, Keabsahan Pemerintah, dan Pergantian pemerintahan secara teratur (Fadjar, 2013:1)

Pemilu Legislatif tahun 2014 ini memilih 560 anggota [Dewan Perwakilan Rakyat](#) (DPR), 132 anggota [Dewan Perwakilan Daerah](#) (DPD), serta anggota [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#) ([DPRD Provinsi](#) maupun [DPRD Kabupaten/Kota](#)) se-[Indonesia](#) periode 2014-2019. Di Indonesia terdapat dua lembaga Legislatif nasional yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan badan yang sudah ada didirikan berdasarkan UUD 1945 dan DPD yang dibentuk pada tahun 2001 adalah lembaga perwakilan baru yang secara konstitusional dibentuk melalui amandement UUD 1945.

Akan tetapi hanya DPR yang melaksanakan fungsi secara penuh, DPD memiliki mandat yang lebih terbatas. Gabungan kedua lembaga ini disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari perwakilan DPR dan DPD yang dipilih untuk jangka waktu lima tahun. DPR terdiri dari 560 anggota yang berasal dari 77 daerah perwakilan

majemuk (*multi member electoral districts*). Yang memiliki 3 sampai 10 kursi per daerah pemilihan (tergantung populasi penduduk dapil terkait) yang dipilih melalui sistem proporsional terbuka. DPD memiliki 132 perwakilan, yang terdiri dari 4 orang dari masing – masing provinsi. Yang dipilih melalui sistem mayoritarian dengan varian distrik berwakil banyak. Sedangkan DPRD Provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi) terdiri dari 34 provinsi, masing – masing berjumlah 35 sampai 100 anggota, tergantung populasi penduduk provinsi yang bersangkutan.

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan termasuk pemilu lokal langsung adalah tingkat partisipasi masyarakat. Dalam hal ini orang akan menganggap semakin tinggi tingkat partisipasi dalam pemilu maka berarti semakin berhasil, demikian juga sebaliknya semakin rendah partisipasinya maka tidak berhasil (Budiarjo, M :1998). Dengan kata lain, adanya (golongan putih) GOLPUT, warga yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tetapi tidak hadir, DPT hadir tetapi tidak menggunakan hak pilihnya, adanya suara tidak sah, dan sebagainya merupakan suatu permasalahan dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Partisipasi politik adalah setiap tindakan sukarela, yang berhasil dan yang gagal, yang terorganisir atau tidak, kadang – kadang atau terus menerus, menggunakan cara-cara yang sah ataupun tidak, untuk mempengaruhi – pilihan kebijakan pemerintah, penyelenggaraan pemerintah, atau pemilihan kepada para pemimpin politik dan pemerintahan pada tingkat nasional atau local (Putranto, Sahdan dan Haboddin, 2009:223). Sedangkan Milbrath dan Goel membedakan partisipasi pemilih menjadi beberapa kategori: *Pertama*, apatis. Artinya orang tidak berpartisipasi dan menarik diri dalam proses politik. *Kedua*, spectator, artinya orang yang pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga* Gladiator, artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik seperti komunikator, apesialis, mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, dan peserta kampanye dan aktivis masyarakat, keempat pengkritik (dalam Sahdan dan Haboddin,2009:234)

.Pendapat lain tentang partisipasi politik (menurut Huntington dan Nelson, dikutip dalam Inu kencana Syafei) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga masyarakat sipil (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan Pemerintah (Budiarjo dalam Faturrohman dan Sabari)

Masih menurut Affan Gafar, partisipasi politik masyarakat biasanya juga bersumber pada basis- basis sosial politik tertentu. Basis yang sama akan mendorong orang untuk berpartisipasi oleh karena itu bisa dikelompokkan atas, *Pertama*, kelas, yaitu individu-individu yang terlibat dalam partisipasi politik karena memiliki status sosial, income dan lapangan pekerjaan yang sama, *Kedua, communal group*, yaitu individu yang terlibat karena memiliki suku, agama, ras dan bahasa yang sama. *Ketiga, neighborhood* yaitu individu – individu yang terlibat karena memiliki tempat tinggal yang berdekatan satu sama lain, *Keempat, faction*, yaitu individu – individu yang terlibat dalam partisipasi karena mereka disatukan oleh inetraksi pribadi yang sangat tinggi satu sama lain yang ditopang pola hubungan yang bersifat *clientilistic* (dalam Sahdan dan Haboddin,2009:234)

Partisipasi politik menurut Mc Closky (1972:252) adalah kegiatan – kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui hal mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan umum. Partisipasi politik dapat dibagi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan kegiatan mengajukan usul mengenai suatu kebijakan, menagajukan kritik terhadap suatu kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin atau pemerintahan. Partisipasi pasif merupakan kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan apa saja yang diputuskan pemerintah. Selain itu ada model yang lain, yaitu golongan putih (golput). Tingginya perilaku politik aktif menunjukkan indikator kedewasaan perilaku demokrasi.

Untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: 1).Terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) dengan terdaftarnya ia punya kesempatan untuk ikut menentukan masa depan bangsa dan negara setidaknya melalui kesertaanya dalam pemilu. (2) Keterlibatannya dalam kampanye baik sebagai tim sukses, peserta, pengawas maupun pemantau pemilu dengan keikutsertaanya bisa mengarahkan pemilih lebih kepada kandidat yang berkualitas bukan hanya karena pertemanan (3) keterlibatan dengan memberikan suara pada hari pencoblosan.

Pengertian dari melek politik adalah sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan yang ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan adalah suatu alat yang diperlukan untuk meraih hak dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan itu sendiri tidak dijalankan begitu saja, akan tetapi dibutuhkan suatu pemahaman dan pengetahuan untuk dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Melek politik ini adalah fondasi yang paling penting dalam membangun suatu bangsa dan negara. Akan lebih baik jika suatu bangsa ini dibangun dan

digerakkan oleh seluruh elemen masyarakat yang terlibat secara aktif, ketimbang hanya digerakkan oleh sekelompok tertentu. Peran politik dari masyarakat ini sangat menentukan ke mana arah layar dan kemudian mesti digerakkan baik ketika laut sedang tenang, atau mungkin sedang bergejolak (Rahmad Abd Fatah, 2009).

Di beberapa artikel dan buku, Istilah melek politik sering disamakan dengan istilah literasi politik (*political literacy*). Menurut pendapat Benard Crick (2000:61) dalam tulisannya *Essays on Citizenship* definisi dasar tentang Literasi Politik adalah, pemahaman praktis tentang konsep – konsep yang diambil dari kehidupan sehari – hari dan bahasa. Merupakan upaya memahami seputar isu utama politik, apa keyakinan utama para konsestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri anda dan saya. Singkatnya, literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Crick menegaskan literasi politik lebih luas melainkan cara “membuat diri menjadi efektif dalam kehidupan publik” dan mendorong menjadi lebih aktif, partisipatif, dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik dalam keadaan resmi maupun di arena publik yang sifatnya suka rela.

Melek politik menurut Jenni S Bev, literasi politik mengacu kepada seperangkat ketrampilan yang diperlukan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, melek politik dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu melek prosedural dan melek substansial. Melek prosedural antara lain memahami regulasi kepemiluan, memahami proses penyelenggaraan pemilu, dan memahami komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Melek substansial antara lain memahami esensi pemilu dalam demokrasi, memahami urgensi partisipasi politik, memahami penyakit politik yang harus dihindari, memahami substansi isi kampanye politik, serta memilih dan memilah dalam pemberian suara.

Terkait dengan pemilihan umum, sejak Juni 2004 Bangsa Indonesia memasuki babak baru dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui prosres langsung. Hal ini menunjukkan melalui lansung berarti mengembalikan “hak- hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis, seperti dinyatakan dalam Undang – Undang No. 15 tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 1 (ayat 11) bahwa Gubernur , Bupati dan Walikota adalah pilihan untuk memilih Gubernur, walikota/Bupati secara demokratis dalam Negara Kesatuan Pancasila dan UUD 1945. Negara memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijakan menyangkut harkat hidup rakyat daerah (Prihantoko, Joko)

Di Indonesia peranan lingkungan sosial tampaknya masih besar apabila dibandingkan dengan keluarga batih, terutama pada lapisan, menengah dan bawah (Soekanto, 2009). Bahkan dapat dikatakan bahwa faktor-faktor eksternal lebih besar peranannya dalam pembentukan kepribadian seseorang. Hal ini tidak saja berkaitan dengan pola hidup spiritual, akan tetapi juga aspek materiilnya. Lingkungan sosial tersebut secara sederhana dapat dibedakan antara lingkungan pendidikan formal, pekerjaan dan tetangga./ kekerabatan.

Kelompok kekerabatan merupakan suatu kelompok yang anggota-anggotanya memiliki hubungan darah atau persaudaraan. Kelompok sosial inilah yang mula-mula muncul sebagai unit pergaulan hidup bagi manusia. Bahkan di Indonesia diantara berbagai suku yang ada, kelompok kekerabatan masih berfungsi secara kuat terhadap kepribadian manusia. Kepribadian tersebut mencakup pola interaksi, sistem nilai-nilai, pola pikir, pola sikap, pola tingkah laku maupun sistem kaidah-kaidah. Kelompok tersebut masih sangat kuat terutama pada masyarakat-masyarakat bersahaja-tradisional. Masyarakat ini banyak terdapat di wilayah pedesaan. Di Indonesia terutama di kota – kota pengaruh keluarga batih terhadap anak besar sekali, sedangkan di wilayah pedesaan biasanya kelompok kekerabatan yang berpengaruh. Walaupun demikian, pengaruh kelompok kekerabatan di wilayah pedesaan biasanya juga berlangsung lewat keluarga batih (Soekanto, 2009).

Pengertian dari melek politik adalah sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan yang ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan adalah suatu alat yang diperlukan untuk meraih hak dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan itu sendiri tidak dijalankan begitu saja, akan tetapi dibutuhkan suatu pemahaman dan pengetahuan untuk dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Melek politik ini adalah fondasi yang paling penting dalam membangun suatu bangsa dan negara. Akan lebih baik jika suatu bangsa ini dibangun dan digerakkan oleh seluruh elemen masyarakat yang terlibat secara aktif, ketimbang hanya digerakkan oleh sekelompok tertentu. Peran politik dari masyarakat ini sangat menentukan ke mana arah layar dan kemudian mesti digerakkan baik ketika laut sedang tenang, atau mungkin sedang bergejolak (Rahmad Abd Fatah, 2009).

Di beberapa artikel dan buku, Istilah melek politik sering disamakan dengan istilah literasi politik (*political literacy*). Menurut pendapat Benard Crick (2000:61) dalam tulisannya *Essays on Citizenship* definisi dasar tentang Literasi Politik adalah, pemahaman praktis tentang konsep – konsep yang diambil dari kehidupan sehari – hari dan bahasa. Merupakan upaya memahami seputar isu utama politik, apa keyakinan utama para konsestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri anda dan saya. Singkatnya, literasi

politik merupakan senyawa dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Crick menegaskan literasi politik lebih luas melainkan cara “membuat diri menjadi efektif dalam kehidupan publik” dan mendorong menjadi lebih aktif, partisipatif, dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik dalam keadaan resmi maupun di arena publik yang sifatnya suka rela.

Melek politik menurut Jenni S Bev, literasi politik mengacu kepada seperangkat ketrampilan yang diperlukan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, melek politik dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu melek prosedural dan melek substansial. Melek prosedural antara lain memahami regulasi kepemiluan, memahami proses penyelenggaraan pemilu, dan memahami komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Melek substansial antara lain memahami esensi pemilu dalam demokrasi, memahami urgensi partisipasi politik, memahami penyakit politik yang harus dihindari, memahami substansi isi kampanye politik, serta memilih dan memilah dalam pemberian suara.

Terkait dengan pemilihan umum, sejak Juni 2004 Bangsa Indonesia memasuki babak baru dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui proses langsung. Hal ini menunjukkan melalui langsung berarti mengembalikan “hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis, seperti dinyatakan dalam Undang – Undang No. 15 tahun 2011. Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 1 (ayat 11) bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pilihan untuk memilih Gubernur, walikota/Bupati secara demokratis dalam Negara Kesatuan Pancasila dan UUD 1945. Negara memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri segala bentuk kebijakan menyangkut harkat hidup rakyat daerah (Prihantoko, Joko)

Di Indonesia peranan lingkungan sosial tampaknya masih besar apabila dibandingkan dengan keluarga batih, terutama pada lapisan, menengah dan bawah (Soekanto, 2009). Bahkan dapat dikatakan bahwa faktor-faktor eksternal lebih besar peranannya dalam pembentukan kepribadian seseorang. Hal ini tidak saja berkaitan dengan pola hidup spiritual, akan tetapi juga aspek materiilnya. Lingkungan sosial tersebut secara sederhana dapat dibedakan antara lingkungan pendidikan formal, pekerjaan dan tetangga./ kekerabatan.

Kelompok kekerabatan merupakan suatu kelompok yang anggota-anggotanya memiliki hubungan darah atau persaudaraan. Kelompok sosial inilah yang mula-mula muncul sebagai unit pergaulan hidup bagi manusia. Bahkan di Indonesia diantara berbagai suku yang ada, kelompok kekerabatan masih berfungsi secara kuat terhadap kepribadian manusia.

Kepribadian tersebut mencakup pola interaksi, sistem nilai-nilai, pola pikir, pola sikap, pola tingkah laku maupun sistem kaidah-kaidah. Kelompok tersebut masih sangat kuat terutama pada masyarakat-masyarakat bersahaja-tradisional. Masyarakat ini banyak terdapat di wilayah pedesaan. Di Indonesia terutama di kota – kota pengaruh keluarga batih terhadap anak besar sekali, sedangkan di wilayah pedesaan biasanya kelompok kekerabatan yang berpengaruh. Walaupun demikian, pengaruh kelompok kekerabatan di wilayah pedesaan biasanya juga berlangsung lewat keluarga batih (Soekanto, 2009).

Almond dan Verba (dalam Martono, 2014) mendefinisikan budaya politik sebagai sebuah sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem tersebut. Masih menurut Almond dan Verba (dalam Martono, 2014) budaya politik berdasarkan dimensi tersebut antara lain: 1) *Budaya politik parokial*, bila masyarakat memiliki frekuensi orientasi terhadap empat dimensi tersebut mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali; 2) *Budaya politik subjek*, bila frekuensi orientasi yang tinggi terhadap sistem politik yang berbeda secara khusus, dan masyarakat menjadi partisipan yang aktif; 3) *Budaya politik partisipan*, bila masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit dalam sistem politik sebagai keseluruhan serta dalam struktur dan proses politik yang administratif.

Salah satu budaya politik termasuk budaya politik yang menonjol di Indonesia yaitu kecenderungan pembentukan pola hubungan patronase, baik di kalangan penguasa maupun masyarakat (James C Scot 1972, Gaffar dalam Martono, 2014). Ada dua individu dalam budaya ini yaitu patron dan klien yang membuat interaksi timbale balik dengan tukar menukar sumber daya masing-masing pihak. *Patron* mempunyai sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan, perlindungan, perhatian dan tidak jarang berupa materi, sedangkan *klien* mempunyai sumber daya berupa tenaga, dukungan, dan loyalitas. Kecenderungan patronase ini dapat ditentukan secara luas baik dalam lingkungan birokrasi maupun dalam kalangan masyarakat.

## **Data**

Kecamatan Girisubo terdiri dari delapan (8) desa, yang meliputi Desa Balong, Jepitu, Karangawen, Tileng, Nglindur, Jerukwudel, Pucung, dan Songbanyu. Lokasi penelitian ini mengambil desa Karangawen dan Desa Jerukwudel. Adapun untuk luas masing-masing desa dan persentase luas desa terhadap Kecamatan Girisubo bisa dilihat pada tabel di bawah 4.1

Tabel 4.1  
Luas Desa dan Persentase Luas Desa Kecamatan Girisubo Tahun 2013

No.	Nama Desa	Luas Desa (Ha)	Persentase Luas Desa Terhadap Luas Kecamatan (%)
1	Balong	1.093,60	11,60219822
2	Jepitu	1.673,40	17,75340024
3	Karangawen	629,9	6,682721891
4	Tileng	1.699,80	18,03348257
5	Nglindur	714,4	7,579197522
6	Jerukwudel	618,50	6,56177725
7	Pucung	1.442,60	15,30480171
8	Songbanyu	1.553,60	16,48242059
Jumlah		9.425,80	100

Sumber : Kecamatan Girisubo Dalam Angka, 2014

Desa Jerukwudel merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Girisubo dengan luas desa 618,50 Ha. Berdasarkan estimasi Sensus Penduduk 2010 - BPS Kabupaten Gunungkidul tahun 2010, jumlah penduduk wilayah Desa Jerukwudel tahun 2013 adalah 1.581 jiwa yang terdiri dari 758 jiwa laki – laki dan 823 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah penduduk wilayah Desa Karangawen tahun 2013 adalah 1.482 jiwa yang terdiri dari 703 jiwa laki – laki dan 779 jiwa perempuan.

Wilayah Kecamatan Girisubo terdiri dari 82 dusun, 82 RW, dan 253 RT. Secara detail jumlah RT, RW, dan dusun di delapan desa bisa dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3  
Jumlah Dusun, RW, dan RT di Kecamatan Girisubo Tahun 2013

No.	Nama Desa	Jumlah		
		Dusun	RW	RT
1	Balong	9	9	47
2	Jepitu	10	10	38
3	Karangawen	8	8	17
4	Tileng	16	16	49
5	Nglindur	8	8	24
6	Jerukwudel	8	8	21
7	Pucung	10	10	31
8	Songbanyu	13	13	27
Jumlah		82	82	253

Sumber : Kecamatan Girisubo Dalam Angka, 2014

Daftar pemilih Kecamatan Girisubo terdiri dari Daftar Pemilih Tetap sejumlah 30.156 orang (di delapan desa) dan Daftar Pemilih Khusus 140 orang (di tujuh Desa). Selain itu DPT ada di 72 (tujuh puluh dua TPS) dan DPK ada di 32 (tiga puluh dua) TPS.

Tabel 4.6

## Daftar Pemilih Kecamatan Girisubo

JENIS DAFTAR PEMILIH	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
DAFTAR PEMILIH TETAP	8	72	14.841	15.315	30.156
DAFTAR PEMILIH KHUSUS	7	32	70	70	140

*Sumber : Pemilu Tahun 2014 Dalam Angka*

Daftar calon tetap Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2014 terdiri dari 447 orang terdiri dari 259 orang laki-laki dan 188 orang perempuan. Sedang untuk Dapil IV yang meliputi wilayah Rongkop, Girisubo, Tepus, dan Tanjungsari yaitu: 81 orang terdiri dari 46 orang laki-laki dan 35 orang perempuan.

## Analisis

### Partisipasi Politik

#### *Menggunakan Hak Pilih*

Sebagai warga negara masyarakat Jerukwudel dan Karangawen sudah menyadari akan hak dan kewajibannya. Salah satu hak warga negara dalam pemilihan umum adalah berhak menggunakan hak pilihnya. Hampir seluruh masyarakat Jerukwudel maupun Karangawen menggunakan hak pilih. Sudaryanto selaku tokoh masyarakat yang terlibat langsung dalam proses Pemilu mengatakan bahwa hampir seluruh warga desa menggunakan hak pilih pada saat hari pemungutan suara. Hal ini seperti hasil petikan wawancara :

“pada hari pemungutan suara hampir seluruh warga yang tercantum dalam DPT datang ke TPS”. (wawancara tanggal 20 Agustus 2015 pukul 10.00 wib).

“hampir semua warga yang mempunyai hak pilih dan berada di rumah sudah menggunakan hak pilihnya. Karena sikap tidak menggunakan hak pilih bagi masyarakat desa merupakan ‘ketidaklaziman’ dan tidak wajar”. ( Informan Sukito Atmojo sebagai ketua KKPPS dan Iduh, sebagai Kadus Karanggede B, petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 10.12 wib)

Ada sebagian masyarakat yang tercatat dalam DPT bekerja di luar daerah. Hal ini ditegaskan pula oleh Sudaryanta (sekretaris KPPS) seperti berikut:

“mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani sedangkan sebagian lainnya bekerja sebagai buruh dan lain-lain di kota lain (Kalimantan, Jakarta, Semarang, Yogyakarta). Pada saat Pileg penduduk yang bekerja di kota lain tersebut tidak berkesempatan pulang dan menggunakan hak pilih (presentase penduduk ini ±30%). Hal ini disebabkan tidak diperbolehkan ijin kerja dsb. Nama-nama penduduk tersebut

tercantum dalam DPT karena mereka memiliki hak pilih”. (Petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 10.34 wib).

Beberapa orang warga desa ini yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak memungkinkan untuk menuju TPS (sudah jompo). Seperti pernyataan Bapak Sukiyatno Kepala Dukuh Duwet yang sekaligus juga sebagai anggota KPPS, menyampaikan :

“Ada dua warga yang sakit tua, Bu Suminem usia 95 tahun. Kondisinya jalan dari kursi ke tempat tidur saja susah. Yang satunya lagi Bu Sakiyem, usia 87 tahun. Kondisi saat Pemilu dulu sudah tidak bisa jalan, sudah ngebrok. Bu Sakiyem pada bulan Juli 2015 meninggal. Dari keluarga Bu Suminem dan Bu Sakiyem, menyampaikan agar anggota keluarganya tersebut tidak usah memilih saja. Beresiko kalau harus memboncengkan orang tua dan sakit”. (petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 13.10 wib)

Namun ada satu informan yang menyatakan secara tegas tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini karena informan merasa tidak punya pilihan. Dan keputusan untuk tidak memilih ini merupakan sikap politik yang bersangkutan. Dalam mengukur partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu syarat pertama hingga ketiga telah terpenuhi, yaitu: 1). Terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT). (2) Keterlibatannya dalam kampanye baik sebagai tim sukses, peserta, pengawas maupun pemantau pemilu dengan keikutsertaannya bisa mengarahkan pemilih lebih kepada kandidat yang berkualitas bukan hanya karena pertemanan (3) Keterlibatan dengan memberikan suara pada hari pencoblosan. Partisipasi yang demikian termasuk partisipasi aktif dalam memilih pemimpin atau pemerintahan.

### ***Pengetahuan Masyarakat Terhadap Caleg***

Dari hasil wawancara dengan informan, hampir seluruh informan mengenal caleg dengan baik. Dalam Pileg 2014, Girisubo termasuk Dapil IV Gunungkidul bersama Tepus, Tanjungsari, dan Rongkop. Di Dapil ini, terdapat 8 orang caleg dari wilayah Girisubo. Namun dari ke kedelapan calon tersebut Caleg yang paling dikenali oleh masyarakat adalah Tina Kadarsih, Gimun, dan Jumeno.

Mayoritas masyarakat memilih calon sesuai dengan pilihannya. Alasan memilih caleg didominasi oleh figur caleg. Sebagian yang lain menyebutkan ketertarikannya pada partai politik. Pengetahuan informan terhadap para caleg karena kekerabatannya yang begitu dekat. Baik sebagai tetangga, saudara, teman maupun simpatisan sehingga para pemilih tidak ada keragu-raguan dalam menentukan pilihan. Konsistensi para pemilih terhadap calon pilihannya menyebabkan mereka solid bahkan mampu menanggulangi pihak lain yang akan

mengintervensi pilihan mereka, meski pihak-pihak tersebut berupaya dengan berbagai macam cara. Sudaryanto mengatakan bahwa :

“sebagian caleg melakukan pertemuan dengan warga sekaligus sebagai kegiatan sosialisasi dalam rangka kampanye”. (petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 13.10 wib)

Sedangkan kampanye penggalangan masa (rapat umum) adalah strategi untuk mempengaruhi masyarakat agar memiliki ketertarikan pada salah satu partai politik. Iduh menjelaskan bahwa :

“kalau di daerah saya, kampanye rapat umum biasanya yang mengadakan adalah dari partai politik, sedangkan caleg biasanya datang dalam pertemuan-pertemuan warga saja untuk mensosialisasikan visi dan misinya”.(petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 13.10 wib)

Ada beberapa warga menjelaskan bahwa mereka sudah mempunyai pilihan caleg tertentu, salah satu pilihan adalah caleg yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Seperti yang dituturkan oleh Sukito Admojo :

“saya sudah mempunyai pilihan sendiri, dan saya mengenal secara pribadi calon tersebut”.(petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 13.10 wib)

Para caleg yang cukup dikenal oleh masyarakat. Sebagai contoh Gimun sebagai anggota masyarakat yang bekerja sebagai petani, terlibat aktif dalam partai PAN dan aktif sebagai anggota dewan budaya desa Jerukwudel, saat Pileg mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan mendapat dukungan masyarakat sekitarnya. Figur ini dipercaya masyarakat akan dapat menyampaikan aspirasi demi kemajuan dan perkembangan desa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudaryanto seperti berikut:

“saya memilih pak Gimun karena saya kenal dan berharap beliau dapat memberi kemajuan bagi desa”. (petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 13.10 wib)

Sudaryanto merupakan kerabat dari Gimun. Sebagai kerabat maka, Sudaryanto memiliki rasa bertanggung jawab untuk mendukung beliau. Sudaryanto menambahkan, dalam menggunakan hak pilih ada budaya *'ewuh pakewuh'* di masyarakat, termasuk dalam menentukan pilihan caleg (mereka memilih kerabat terdekatnya). Sedangkan Iduh menambahkan bahwa:

“pak Gimun itu orangnya sering mengikuti kegiatan sosial di masyarakat dan merupakan tokoh masyarakat yang sering memberikan masukan bagi perkembangan

desa sehingga banyak orang yang kenal dengan beliau”. (petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 11.10 wib)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa figur caleg yang sering berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat lebih diminati. Kekerabatan para caleg ini sangat dekat dengan pemilih. Kekerabatan tersebut membentuk salah satu budaya politik yang homogen yang menjadi bagian dari proses sosialisasi politik. Dari hasil perolehan suara, Gimun kalah dari perolehan Tina Kadarsih. Strategi yang digunakan oleh Tina Kadarsih berbeda dengan strategi yang digunakan Gimun, hal ini seperti penuturan Iduh sebagai berikut:

“Strategi yang digunakan Tina Kadarsih adalah dengan mendirikan TCC-nya (*Tina Cadarsih Centre*) yang digunakan sebagai alat bersosialisasi kepada masyarakat”. (petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 11.10 wib)

Selain itu, menurut Sukito Atmojo menyebutkan bahwa beberapa caleg memberikan bantuan secara personal maupun kelompok tetapi yang bersangkutan tidak menerima bantuan tersebut karena calon pemberi merasa enggan dan tidak akan mempengaruhi pilihan. Sudaryanto menyebutkan berupa bantuan pembangunan jalan, uang, seperangkat gamelan dan *dropping* air bersih.

Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat jelas tidak hanya karena satu faktor saja, melainkan berbagai faktor. Orang bisa saja terdorong untuk berpartisipasi karena kualitas calonnya baik, tetapi biasanya juga karena calon biasanya merupakan keluarganya, saudara atau teman dari para pemilihnya,. Ada dua individu dalam budaya ini yaitu patron dan klien yang membuat interaksi timbal balik dengan tukar menukar sumber daya masing-masing pihak. Patron mempunyai sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan, perlindungan, perhatian dan tidak jarang berupa materi, sedangkan klien mempunyai sumber daya berupa tenaga, dukungan, dan loyalitas. Bagi masyarakat desa Jerukwudel dan Karangawen hal ini dipahami sebagai hal yang wajar apalagi kondisi desa yang memang masih membutuhkan bantuan seperti pembangunan sarana dan pra sarana serta penyediaan air bersih (mengingat kondisi desa termasuk daerah rawan kekeringan). Sedangkan Suharno mengatakan bahwa dia tidak memilih caleg karena diberi bantuan tetapi mengenal betul figur caleg yang dia pilih karena:

“saya mengenal caleg karena memiliki hubungan keluarga dan bertempat tinggal dekat rumah.” (petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 11.10 wib dan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 13.10 wib)

Kedekatan hubungan keluarga yang demikian memungkinkan caleg memiliki dukungan yang merata, bahkan beberapa caleg dapat menembus perolehan suara maksimal untuk mendapatkan jatah kursi. Selain hubungan kekeluargaan, masyarakat juga beralasan memilih karena adanya hubungan bisnis. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sarpanta dan Kaswan berikut ini:

“....saya mengenal caleg karena memiliki hubungan relasi bisnis yang sudah lama terjalin....” (informan Sarpanta, petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 11.10 wib) “saya mengetahui wajah caleg dari sosialisasi dan spanduk yang terpasang di jalan”. (informan Kaswan, petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 09.20 wib)

Sedangkan Surip, Rianti, Sanem dan Suparto tidak mengenal secara langsung namun kenal dari tetangga dan Dukuh. Heni memiliki pilihan yang berbeda karena informasi yang dimiliki dari kampanye caleg. Namun ada beberapa informan yang menyatakan tidak mengenal caleg sehingga dalam menggunakan hak pilihnya ada yang ‘asal memilih’. Di sisi lain, para pemilih yang tidak mengenal tersebut beralasan tempat tinggal maupun kekerabatannya tidak dekat dengan para caleg.

### ***Alasan Informan Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu***

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa semua menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif tahun 2014, dan sebagian besar memahami hak dan kewajiban warga Negara. Sebagian lainnya menyatakan bahwa berpartisipasi turut serta dalam menentukan nasib bangsa. Informan memiliki alasan yang berbeda-beda dalam menggunakan hak pilihnya, seperti dikemukakan oleh para informan bahwa:

“alasan saya menggunakan hak pilih saya karena mendapat undangan, menyadari tanggungjawab saya, dan karena memiliki hak pilih”. (informan Heni Nurhayati, petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 13.10 wib)

“saya memilih karena saya baru satu kali mencoblos (Menjadi pemilih pemula)”. (informan Riksa Ristu Putra, petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 13.10 wib)

“...menggunakan hak pilih dalam pemilu adalah hak dan tanggung jawab saya sebagai warga negara yang baik..” (Informan Kaswan, petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 14.10 wib)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat yang besar karena masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dimana sikap ini merupakan salah satu dimensi yang dapat menjadi indikator budaya politik seperti tingkat

pengetahuan masyarakat mengenai sistem politik bernegara. Dalam hal ini masyarakat desa Jerukwudel maupun Karangawen cukup dewasa dalam bersikap sehingga sebagian besar memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun masih adanya budaya '*ewuh pakewuh*' di masyarakat, merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS. Seperti pendapat Sudaryanto yang menyatakan bahwa:

“adanya sikap '*ewuh pakewuh*' di masyarakat menyebabkan tingkat kehadiran di TPS pada saat pemungutan suara menjadi tinggi karena jika tidak menggunakan hak pilihnya maka masyarakat merasa *isin* dan *ora kepenak atine, umum sanak mas*”. (petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 09.30 wib)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya budaya yang dianut oleh masyarakat yaitu budaya "*ewuh pakewuh*" menyebabkan masyarakat datang ke TPS karena jika tidak datang maka akan merasa malu dan merasa memiliki beban moral terhadap masyarakat yang lain. Letak TPS yang tidak terlalu jauh dan mudah dijangkau dari tempat tinggal juga merupakan alasan masyarakat untuk datang dan menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Sanem berikut ini:

“.....*kulo nggih dugi mas ten TPS, lha wong gur cerak kok mosok ora teko..* (saya juga datang di TPS soalnya jaraknya hanya dekat saja masak tidak berangkat)...” (petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 10.30 wib)

Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi politik adalah kesadaran sosial untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih termasuk tanggung jawab sebagai anggota masyarakat.

### **Peran Agen-agen Sosialisasi Politik**

Dalam suatu proses sosialisasi nilai dan perilaku politik diperlukan agen-agen sosialisasi yang merupakan pihak yang melakukan transfer nilai. Agen pertama adalah keluarga dimana individu menerima warisan nilai-nilai pada tahap awal dalam hidupnya. Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa keluarga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pemahaman politik khususnya dilingkungan keluarga. Hal ini seperti penuturan Riksa Ristu Putra berikut ini :

“...saya banyak belajar dari ayah saya terkait dengan pemilu, saya sering bertanya tentang pemilu kepada bapak saya itu lho mas...walaupun tidak semuanya dapat dijawab oleh bapak saya...” (petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 09.30 wib)

Hal tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan keluarga dalam mendorong partisipasi politik seseorang cukup signifikan. Setidaknya dalam keluarga yang memiliki minat politik yang tinggi, cenderung homogen dalam pilihan politik, Aspek-aspek kehidupan keluarga yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi partisipasi politik seorang anak. Hal tersebut tampak jelas dipengaruhi oleh: 1) Tingkat daya tarik keluarga bagi seorang anak; 2) Tingkat kesamaan pilihan (*preferensi*) politik orang tua; 3) Tingkat keutuhan (*cohesiveness*) keluarga; 4) Tingkat minat orang tua terhadap politik; 5) Proses sosialisasi politik.

Sedangkan keluarga batih berkaitan erat dengan unit yang lebih besar lagi, yang lazim disebut kelompok kekerabatan. Kelompok kekerabatan merupakan suatu kelompok yang anggota-anggotanya memiliki hubungan darah atau persaudaraan (pada umumnya masyarakat pedesaan masih memiliki kekerabatan dan hubungan keluarga yang sangat dekat). Kelompok tersebut masih sangat kuat terutama pada masyarakat-masyarakat bersahaja-tradisional. Masyarakat ini banyak terdapat di wilayah pedesaan, termasuk desa Jerukwudel dan Karangawen. Sekolah juga merupakan agen sosialisasi politik sebab sekolah menjalankan fungsi transformasi ilmu pengetahuan, nilai dan sikap yang di dalamnya juga termasuk ilmu, nilai, dan sikap politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Riksa seperti berikut ini:

”...menurut saya sekolah banyak memberikan pengetahuan bagi saya terkait dengan hak dan kewajiban saya sebagai warga Negara Indonesia, dan salah satu hak dan kewajiban saya adalah memberikan hak suara saya dalam pemilu...” (petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 09.30 wib)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah mampu membentuk sikap dan nilai politik bagi masyarakat khususnya bagi para pemilih pemula. Selain lembaga keluarga dan sekolah, sosialisasi politik juga dapat melalui teman sebaya (*peer group*) yang sifatnya informal. Teman sebaya memiliki peranan yang penting bagi pendidikan politik. Sedangkan pendapat Heni Nurhayati seperti petikan wawancara berikut ini:

“...saya biasanya mendiskusikan masalah-masalah politik dengan teman-teman saya, saya senang bisa berdiskusi dengan teman saya karena kita bisa lebih terbuka...” (petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 09.30 wib)

Sudaryanto mengatakan bahwa diskusi politik dalam arti yang luas merupakan hal yang biasa. Apalagi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah sebagai perannya dalam bidang politik. Namun Sudaryanto tidak mau berdiskusi politik praktis

karena sebagai aparat pemerintah harus bersikap netral, khawatir akan mempengaruhi kinerjanya. Sukito Atmojo berdiskusi tentang caleg di rumah warga saat pertemuan. Demikian halnya dengan Riksa, Suharno, Sanem, Surip dan Rianti yang mendiskusikan caleg yang akan dipilih. Riksa juga berdiskusi tentang bagaimana cara berpolitik yang baik. Sedangkan Kaswan tidak berdiskusi politik karena merasa tidak paham masalah politik, Sarpanta mengatakan takut kalau salah persepsi. Hal tersebut oleh masyarakat dimaknai sebagai ranah politik dalam arti yang luas. Dalam mendiskusikan politik praktis, masyarakat sangat berhati-hati karena kekerabatannya yang begitu dekat. Sedangkan agen sosialisasi terakhir adalah media, dimana berita yang dilihat atau dibaca setiap hari merupakan sosialisasi yang efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudaryanta berikut ini:

“...saya sering membaca koran *Kedaulatan Rakyat* dan biasanya saya memperoleh informasi yang berkaitan dengan politik berasal dari Koran tersebut...” (petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 09.35 wib)

## **Melek Politik**

### ***Keterlibatan masyarakat dalam Kegiatan Partai Politik***

Sebagian besar informan menyatakan tidak terlibat dalam kegiatan partai politik. Ketidakterlibatan ini didasari alasan ketidakmampuan, ketidaktertarikan, ketidakpahaman proses politik dan sikap netralitas (karena yang bersangkutan adalah PNS dan aparat pemerintah seperti Surip, Suharno, Suprpto, Heni Rianti, dan Sarpanta). Sedangkan Kaswan dan Sukito Atmojo memilih bersikap netral, bebas aktif dan tidak terlibat partai karena dia bekerja sebagai guru PNS dan anggota KPPS. Demikian halnya dengan Sudaryanto yang memilih netral karena sebagai aparat pemerintah desa serta bertugas sebagai anggota KPPS. Sanem memiliki pendapat yang berbeda seperti penuturannya sebagai berikut:

“*Kulo mboten purun tumut parte-partean... walah nopo niku.. sing penting kulo nek kon mangkat coblosan nggih mangkat... (saya tidak mau ikut partai politik..apa itu... yang penting saya kalau diminta untuk memberikan suara saya berangkat)...*” (petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 10.30 wib)

Dari hasil petikan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih memilih bersikap politik pasif dan enggan untuk ikut berpolitik aktif dengan ikut dalam partai politik. Bagi informan yang terlibat dalam partai, dimotivasi oleh ketertarikan kepada partai politik. Iduh menjelaskan hal tersebut sebagai aktivis partai PPP. Selaku Dukuh, ketertarikan kepada partai politik didasari semangat untuk membangun desa demi kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan dan ketidakterlibatan informan di atas, menggambarkan perilaku

masyarakat dalam hal terlibat dalam partai politik. Perbedaan kelas sosial dalam suatu masyarakat akan berpengaruh pada perbedaan keyakinan dan pola perilaku individu di berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik.

### ***Pernah menjadi KPPS***

Sebagian besar informan mengatakan tidak pernah ikut dalam KPPS. Alasan yang mendasari informan tidak ikut sebagai KPPS karena ketidakmampuan, ketidaktertarikan serta tidak ada minat. Sanem, Surip, Riksa, Suharno, Heni, Rianti dan Suparto menyatakan hal tersebut. Sukito Atmojo mengatakan sudah sering menjadi anggota KPPS sejak Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Sarpanta dan Kaswan pernah bertugas sebagai KPPS selama 3 periode. Sudaryanto menjadi sekretariat KPPS. Demikian halnya Iduh sebagai Dukuh turut bertugas sebagai KPPS. Dalam mengukur partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu syarat kedua yaitu keterlibatannya dalam kampanye baik sebagai tim sukses, peserta, pengawas maupun pemantau pemilu dengan keikutsertaannya bisa mengarahkan pemilih lebih kepada kandidat yang berkualitas bukan hanya karena pertemanan. Partisipasi yang demikian termasuk partisipasi aktif dalam mensukseskan agenda-agenda Pemilu.

### ***Memahami Tahapan Pemilu***

Riksa dan Heni merupakan pemilih yang mengenyam pendidikan tinggi meski tidak terlibat dalam agenda pemilu. Sedangkan Iduh, Sarpanta, Kaswan, Sudaryanto dan Sukito Atmojo memahami tahapan pemilu karena terlibat langsung dalam agenda pemilu. Dari informan yang mereka ketahui antara lain tercantumnya nama dalam daftar DPT, masa kampanye, sosialisasi tentang Pemilu, aturan main dalam kampanye, memahami dokumen KPU.

Informan yang tidak memahami tahapan pemilu didominasi oleh tidak adanya informasi tentang tahapan pemilu. Sanem, Surip, Suparto, Suharno dan Rianti (informan ini berpendidikan SD) menyatakan hal tersebut. Tahapan Pemilu merupakan salah satu agenda sosialisasi. Di samping keluarga dimana individu menerima warisan nilai-nilai pada tahap awal dalam hidupnya, sosialisasi ini dapat terjadi secara represi atau partisipatoris. Sosialisasi politik juga dapat melalui teman sebaya (*peer group*) yang sifatnya informal. Pengetahuan warga negara, nilai-nilai, sikap dan perilakunya dalam kehidupan demokrasi tersebut dipengaruhi oleh sosialisasi politik.

### ***Menjadi Saksi***

Sebagian besar informan mengatakan tidak pernah menjadi saksi, namun sebagian informan pernah menjadi saksi karena dengan alasan dipilih petugas dan panitia serta teman mereka. Dengan menjadi saksi dalam pemilu, maka mereka termasuk dalam kategori *Electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu. Namun partisipasi masyarakat desa Jerukwudel maupun Karangawen yang tergolong *electoral activity* sebagai saksi tidak terlalu tinggi.

### ***Mengetahui Namanya Tercantum dalam DPT***

Sebagian besar informan mengetahui namanya tercantum dalam DPT dari papan informasi yang mereka baca di TPS dan sebagian lagi melalui Dukuh dan RW (informasi tersebut disampaikan secara langsung dalam pertemuan warga). Sedangkan informan yang tidak mengetahui namanya tercantum dalam DPT mendapat undangan untuk hadir dalam pemungutan suara. Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa namanya sudah terdaftar di DPT, seperti diungkapkan oleh Atmo Sukito, Kaswan, Sudaryanto, Heni, Sanem, dan Sukiyatno. Kaswan menuturkan:

“saya tahu nama saya terdaftar, ya dari pak dukuh... selain itu rumah saya ditempel stiker pencatatan pemilih..”

Dengan adanya stiker di rumah, warga mengetahui bahwa mereka berhak untuk memilih dalam Pemilihan Umum.

### ***Mengetahui Pemilu Bersih***

Demikian halnya dalam pengetahuan masyarakat akan Pemilu bersih, beberapa warga mengungkapkan pentingnya pelaksanaan pemilu yang bersih dan bertanggungjawab. Seperti penuturan Atmo Sukanto:

“Pemilu bersih sangat penting, karena warga ingin suasana yang damai dan tidak ada perpecahan. Semua..kan ya untuk masyarakat to mas..” (wawancara tanggal, 20 Agustus 2015 pukul 11.15 Wib)

Warga sebenarnya sudah sadar betul tentang pentingnya pemilu yang bersih dan bermartabat. Masyarakat berpendapat bahwa dengan Pemilu bersih maka akan menemukan

pemimpin yang memikirkan masyarakatnya. Pendapat tersebut disampaikan oleh Sudaryanto dalam petikan wawancara berikut ini:

“ Saya berkeyakinan pemimpin yang dipilih secara bersih dan jujur akan dekat dengan masyarakat, dan tidak akan meninggalkan masyarakatnya demi kepentingan pribadinya..” (wawancara tanggal 20 Agustus 2015 pukul 11.15 Wib)

Dari hasil wawancara tersebut sudah diketahui harapan masyarakat terhadap pemilu yang bersih, dan jujur. Harapan masyarakat dengan pemilu yang bersih dan jujur, adalah terpilihnya pemimpin yang mau memperjuangkan aspirasi masyarakatnya.

### ***Mengetahui Serangan Fajar***

Sebagian informan mengetahui adanya serangan fajar. Praktek ini merupakan salah satu strategi untuk memobilisasi suara masyarakat. Dalam hal ini Riksa mengatakan bahwa:

“saya diberi uang tapi saya tolak.” (petikan wawancara tanggal 21 Agustus 2015 pukul 10.30 wib)

Sukito menyatakan memang ada serangan fajar namun tidak akan mempengaruhi pilihannya, bahkan beberapa informan mengatakan ada partai yang melarang untuk memberi uang. Dalam hal ini Sudaryanto mengatakan bahwa praktek ini tidak banyak mempengaruhi pilihan masyarakat. Bagi mereka hal ini sangat sensitif, dengan budaya ‘*ewuh*’ mereka masih mengedepankan pilihan nurani, apalagi dengan kekerabatan yang begitu dekat.

### **Penutup**

#### **Kesimpulan.**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa agen-agen sosialisasi politik seperti keluarga, sekolah, teman, dan media mampu membentuk dan mempengaruhi tingkat melek politik di masyarakat serta meningkatkan efektifitas diri dalam kehidupan publik dan mendorong menjadi lebih aktif, partisipatif, dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik baik dalam keadaan resmi maupun di arena publik yang sifatnya suka rela. Disamping agen – agen sosialisasi tersebut, tokoh masyarakat memberikan peran yang cukup besar dalam sosialisasi politik. Secara khas, budaya masyarakat Jawa ‘*ewuh pakewuh*’ mendominasi perilaku partisipasi masyarakat ini. Budaya tersebut tidak hanya muncul pada saat menghadiri TPS namun juga dalam hal menentukan pilihan. Keragaman tingkat usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan sedikit banyak menambah variasi kedalaman pemahaman mereka mengenai partisipasi politik.

Tersirat pula bahwa dalam hal melaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Partisipasi politik, pada tataran *electoral activity* yang meliputi khususnya kegiatan memilih CALEG dan mengikuti kampanye dapat disimpulkan bahwa hampir secara keseluruhan masyarakat desa Jerukwudel dan Karangawen berpartisipasi politik **cukup memadai** dan tidak menarik diri dalam proses politik. Namun untuk aspek *organizational activity*, partisipasi politik **masih kurang memadai** yang ditandai masih terbatasnya akses, peran, dan kedudukannya selaku pemimpin partai, anggota aktif partai, dan menjadi CALEG itu sendiri, bahkan sampai terpilih menjadi legislatif.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa PEMILU tetap dibutuhkan oleh warga sebagai media dan sarana terbaik menuju pemerintahan yang demokratis, karena mayoritas responden telah menyadari dan memahami arti pentingnya PEMILU sebagai bentuk partisipasi politik bagi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara.
3. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan prosedural dan administratif dalam partisipasi politik warga, dan hal tersebut menjadi tugas semua pihak termasuk penyelenggara pemilu dan SKPD yang membidangi Bidang Politik untuk segera diselesaikan yaitu : ijin kerja dan biaya kerja untuk pulang karena bekerja di luar daerah meskipun namanya sudah tercantum dalam DPT di Girisubo. Angka 30 % harus menjadi perhatian melalui penyadaran dan intensifikasi sosialisasi politik agar partisipasi politik dapat ditingkatkan.
4. Bentuk-bentuk dan kadar partisipasi mayoritas masyarakat desa Jerukwudel dan Karangawen masih pada fase proses menuju aktif, dimana dalam proses politik aktivitas mereka belum menonjolkan peranannya sebagai komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, peserta kampanye dan aktivis masyarakat. Peranan tokoh dan budaya jawa (baca “ ewuh pakewuh”) menjadi penting diperhatikan sebagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi, khususnya kehadiran dalam memilih. Hal tersebut sesuai dengan pola budaya Jawa dalam partisipasi politik sebagaimana dikenal dengan budaya *Patron Client* yaitu hubungan antara patron dan klien yang membuat interaksi timbal balik dengan tukar menukar sumber daya masing-masing pihak.
5. Melek politik desa Jerukwudel dan Karangawen berdasarkan hal penelitian sudah cukup memadai, paling tidak pada pengetahuan tentang pemilu bersih, ada tidaknya serangan fajar, dan pengetahuan kriteria tentang PenCALEGan. Hal tersebut merupakan modal

yang penting untuk meningkatkan partisipasi politik, sebagai contoh ketika serangan fajar sebagai bentuk perilaku yang negatif, maka mereka tentu akan menolaknya.

### **Rekomendasi.**

Selanjutnya berdasarkan penelitian dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data PEMILU agar diperbaiki. Kisaran data 30 % DPT yang tidak berpartisipasi agar dicermati kembali agar persoalan data ke depan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan PEMILU.
2. Partisipasi dalam kontrol pemilu agar juga ditingkatkan agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil, oleh karena itu syaratnya pemilih harus melek politik terlebih dahulu.
3. Melek politik di Kecamatan Girisubo agar ditingkatkan melalui media-media komunikasi politik yang lebih efektif bagi mayoritas warga perdesaan dengan memanfaatkan bidang kesenian daerah seperti pementasan Ketoprak bisa digunakan sebagai media pembelajaran tentang Pemilu dan demokrasi.
4. Untuk meningkatkan melek politik warga diperlukan keterlibatan semua pihak yang meliputi : penyelenggara pemilu, KPU, Kantor KESBANGPOL, partai politik, ormas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama melalui pendidikan politik secara berjenjang dan berkelanjutan, yang mencerdaskan secara politik ke arah pemahaman tentang pemilu termasuk mengenali visi misi caleg, tata cara pencalegan, pemilu yang bersih, penghindaran politik uang seperti serangan fajar dan sebagainya.

## Daftar Pustaka

- Bakti, AndiFaisal, Prof, Ph.D dkk (2012), *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*, Churia Press, Tangerang selatan, 2002
- Budiardjo, Miriam, (1986), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Cetakan X: April 1986, Jakarta.
- Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*,. Refika aditama, Bandung, 2002
- Fadjar, A, Muktie ,2013. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi: Membangun Legislatif, Presiden dan Kepala daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Malang, setara Press.
- Faturrahman, Deden, dan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Universitas Muhammadiyah Malang 2004.
- Fatah, Rahmad Abd., (2009), *Melek Politik*, <http://nohsaketa.blogspot.com/2009/07/melek-politik.html>, Sabtu, 18 Juli 2009,
- Maran, Rafael Raga, (2007), *Pengantar Sosiologi Politik*.
- Martono, Nanang, (2014), *Sosiologi Perubahan: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Post Kolonial*.
- Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Pribadi, Toto dkk, (2010), *sistem Politik Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Cetakan Ketujuh : April 2010
- Sahdan, Gregorius dan Haboddin, Muhtar, (2009), *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan di Indonesia*.
- Soekanto, Soerjono, (2009), *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*.
- Sugiyono, 2009, *Statistik untuk penelitian*, ALFABETA, Bandung.
- Sutoro Eko, 2004 *Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. APMD press, yogyakarta.
- Tricahyo, Ibnu 2009. *Refoemasi Pemilu: menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Malang: In Trans Publising.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum.